

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
KELURAHAN SOGATEN TAHUN 2024**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode: Sangat Rahasia ( SR ) Rahasia ( R ) dan Konfidensial ( K )	Permen PAN RB No 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan pimpinan, Membahayakan dan merugikan negara	Menjaga kerahasiaan pemerintah, Menjaga koordinasi, kondusifitas, keamanan dan keselamatan
2	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 66 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung	Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat	Terjaganya keobjektifitasan
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 66 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Penetapan pengadaan yang objektif dan transparan
4	Arsip daftar orang yang tergabung dalam G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H dan J tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 43 Tahun 2009 pasal 66 ayat 3 huruf H tentang Kearsipan	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
5	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: Dokumen Keuangan: 1. SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran dan otorisasinya 2. Surat pencairan anggaran;  Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan; Disposisi surat pimpinan; Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah.	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf A dan I tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 dan 2 tentang Kearsipan	Selama masih berlaku; Selama masih berlangsung penyelenggaraannya; Selama status perlindungan masih berlaku; Sampai dengan proses penyelesaian konflik	Menghambat proses penegakan hukum; Menggangu kepentingan perlindungan hak; Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi; Menggangu proses pelaksanaan kegiatan; Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Menyediakan data lengkap yang dilindungi proses penegakan hukum; Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi; Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan; Mengamankan proses penyusunan kebijakan.

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
6	Data pribadi penduduk (Kartu Keluarga dan Nomor Identitas Kependudukan)	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 23 Tahun 2006 pasal 84 ayat 1 dan 2 & pasal 85 ayat 1, 2 dan 3 tentang Administrasi Kependudukan; UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 pasal 27 ayat 1, Pasal 79 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan.	Permanen/atas ijin yang bersangkutan/kepentingan publik yang berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	Mengungkap rahasia pribadi; Berpotensi disalahgunakan	Melindungi data pribadi
7	Penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai	PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS	Selama masih berlaku	Dapat disalahgunakan	Bisa menjaga keakuratan dan obyektifitas PNS
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Mengungkap rahasia pribadi; Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi PNS; Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9	Data pribadi penduduk	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tidak terbatas	Data pribadi berpotensi di salahgunakan	Melindungi data pribadi
10	Data objek pajak dan retribusi	UU No 11 Tahun 2008 pasal 40 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada perintah penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengamankan database obyek pajak
11	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia kekayaan pribadi	Melindungi rahasia kekayaan pribadi